

Ekonomi Politik Keuangan Mikro: Finansialisasi Kemiskinan dalam Kebijakan Dana Bergulir di Kabupaten Sidoarjo

Adrian Radityatama

Email : adrianradityatama@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana intervensi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap usaha mikro melalui Kebijakan Pemberian Dana Bergulir bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membantu UMKM melalui kebijakan dana bergulir di Sidoarjo? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif yang berfokus pada implementasi kebijakan dana bergulir. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode purposive sampling, dimana peneliti telah menentukan sebelumnya siapa pihak-pihak terkait yang akan diwawancarai. Pihak-pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bank Jatim, Penerima dana bergulir dan Bank lainnya yang menyalurkan pinjaman kepada UMKM. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjelasan ekonomi politik keuangan mikro oleh Philip Mader. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang kemudian akan dianalisa menggunakan kerangka teori.

Penelitian ini menemukan upaya negara dalam mempengaruhi pasar, yaitu negara berperan sebagai investor dan regulator dalam kebijakan dana bergulir. Yang menyebabkan terjadi finansialisasi terhadap bantuan usaha yang diberikan. Selain itu terjadi finansialisasi terhadap kemiskinan yang terjadi dimana upaya pengentasan kemiskinan masyarakat melalui sistem finansial dengan mengilangkan *credit barrier* kelas menengah kebawah. Kelompok yang diuntungkan dalam kebijakan ini adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bank Jatim dan Pengusaha UMKM yang berhasil memanfaatkan kebijakan dana bergulir dan pihak yang dirugikan dalam kebijakan ini adalah pengusaha yang gagal dan bank lainnya yang menyalurkan UMKM.

Kata kunci : Keuangan Mikro, Dana Bergulir, Ekonomi politik, UMKM

ABSTRACT

This study reviews how Sidoarjo City Government intervention to micro-enterprises through the Revolving Fund Granting for MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) Policy in Sidoarjo. How Sidoarjo regency government to help SMEs through the revolving fund policy in Sidoarjo? Who benefits and harmed by these policies?

The method used in this research is qualitative descriptive that focus on policy implementation of revolving fund. This research is trying to bring a new understanding of microfinance through the perspective of political economy. In contrast to previous studies, this study tries to bring an understanding of microfinance to the next stage by questioning how microfinance works. By analyzing the revolving fund policy by the Government of Sidoarjo regency and connect this phenomenon with the literature on the political economy

of microfinance which began to appear today. In addition, this intensive search will try to answer who the parties are gainers and losers with this policy by a political economy approach Keynes.

This study found the state's effort to intervent the market, the state acted as investors and regulators in revolving funds policy. Which led to a financialization in a revolving fund policy. In addition, there financialization on poverty, where government alleviating poverty through the financial system by erase credit barrier for middle and low class. The group benefited by this policy is the Sidoarjo City Government, Bank Jatim and SMEs Entrepreneurs that successfully utilize the revolving fund policy and losers in this policy is a failed businessman and the other banks that channel SMEs.

Keywords: Microfinance, Revolving Fund, Political Economy, SMEs.

PENDAHULUAN

Perkembangan keuangan mikro telah menjadi senjata baru dalam merespon kemiskinan oleh aktor-aktor neoliberal seperti Bank Dunia. Hal ini tergambarkan dari penjelasan mengenai keuangan mikro oleh salah satu ilmuwan ekonomi politik asal Inggris, Philip Mader:

Microfinance remain an intervention that is materially and ideologically wedded to a neoliberal politics of development which still benefit from massive political support form key player such as the world bank and major national donor agencies. (Mader, 2015:6

Bank Dunia berupaya mengintegrasikan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal dengan jenis lembaga keuangan formal yang cocok dengan keadaan mereka. Lembaga keuangan mikro juga telah banyak bermunculan di negara-negara berkembang. Seperti kisah Muhamad Yunus dari Bangladesh yang dianugrahi nobel pada tahun 2006 dengan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lembaga keuangan mikro miliknya, Grameen Bank. Yunus beranggapan bahwa kredit merupakan salah satu hak manusia dan mampu merubah masyarakat miskin menjadi independen dan lebih sejahtera. Menurutnya, lembaga keuangan formal juga dapat mengatasi masalah kemiskinan melalui finansialisasi terhadap mereka yang dianggap miskin.

Indonesia juga memiliki jumlah usaha mikro yang tergolong besar. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukan dari total entitas usaha di Indonesia, 92 persen atau 51 juta entitas usaha tergolong usaha mikro. Apabila digabung dengan usaha kecil maka menjadi 99 persen dari seluruh entitas usaha di Indonesia, sisanya usaha menengah dan besar.¹ (Virdani, 2016). Besarnya usaha mikro di Indonesia menunjukan bahwa menjadi pelaku usaha mikro merupakan pilihan yang banyak diambil masyarakat Indonesia untuk mendapatkan penghasilan.

Usaha mikro juga merupakan jenis usaha yang mendominasi jumlah usaha di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2014 tercatat jumlah UMKM mencapai 171.264 usaha untuk usaha besar 16.000 , usaha mikro 154.891, usaha kecil menengah 154 buah. (Berita Jatim, 2016) Apabila melihat data tersebut jenis usaha mikro masih mendominasi jumlah usaha di Sidoarjo.

Dalam pengelolaannya saat ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh Bank Jatim sebagai penyalur kredit. Dana bergulir di Kabupaten Sidoarjo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM, yang menugaskan Bank Jatim sebagai penyalur dana bergulir di Sidoarjo. (Prastiany, 2016) Jumlah presentase kredit macet yang dikelola juga terlihat mengalami penurunan tiap tahunnya. Menurut Feni, kepala dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Sidoarjo, tahun 2012 lalu kredit yang macet sebesar Rp5,2 miliar, dengan usaha keras maka tahun 2013 menurun jadi Rp4,2 miliar, dan tahun 2014 turun lagi menjadi hanya Rp3,8 miliar. (Humas Protokol Kabupaten Sidoarjo, 2016) Adanya Bank Jatim sebagai pihak ketiga dalam kebijakan tersebut terlihat cukup membantu dalam masalah efektifitas penyaluran kredit.

Penelitian ini mencoba membawa pemahaman tentang keuangan mikro ke tahap berikutnya dengan mempertanyakan bagaimana keuangan mikro bekerja. Dengan menganalisa kebijakan dana bergulir oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan menghubungkan fenomena tersebut dengan literatur-literatur mengenai ekonomi politik keuangan mikro yang mulai banyak muncul dewasa ini. Selain itu penelitian ini juga akan mencoba menjawab siapa pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya kebijakan ini dengan pendekatan ekonomi politik Keynes.

Sejarah keuangan Dana Bergulir

Pada tahun 2002 kebijakan dana bergulir diprakarsai oleh pemerintah pusat yang berupaya menyalurkan dana yang awalnya sebesar 500 juta rupiah untuk membantu pelaku UMKM di Sidoarjo dalam memaksimalkan potensi usahanya dan menambah omset penghasilan. Pemerintah Sidoarjo diberikan tanggung jawab sebagai pengelola dana bergulir tersebut nampaknya berhasil mengelola dengan baik. Dana yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu bertambah. Dana yang berasal dari pemerintah pusat tersebut disalurkan kepada UMKM beserta bunganya dalam pengembaliannya. Dana yang disalurkan dan dikembalikan secara bergulir dan berulang-ulang tersebut jumlahnya justru bertambah dan membantu PAD Kabupaten Sidoarjo. Dana yang awalnya hanya 500 juta yang disalurkan seiring waktu bertambah sebab keuntungan yang didapatkan yang berasal dari bunga yang disetujui. Pemerintah berhasil memanfaatkan dana yang dimilikinya untuk membantu UMKM dan menambahkan PAD Kabupaten Sidoarjo.

Di Tahun 2005 dana bergulir yang mendapatkan bantuan dari uang APBN setiap tahunnya ini pun lama kelamaan berhenti didukung oleh APBN. Pemerintah pusat tidak lagi menyalurkan dana bergulir kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Karena keuntungan yang bisa dihasilkan PAD dan keberhasilannya meningkatkan usaha UMKM sumber dana bergulirpun tetap dilanjutkan namun dipindahkan sumber dananya. Dana bergulir ini kemudian dibebankan pada APBD Kabupaten Sidoarjo. Walaupun sudah dipindah bebaskan dana.

Namun dalam perjalanannya penyaluran kredit langsung oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini juga mengalami banyak kekurangan. Salah satunya adalah masih tingginya tingkat KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang terjadi. Pengawas Kementerian Keuangan melihat bahwa di banyak daerah masih banyak ditemui tindakan KKN yang memanfaatkan kebijakan dana bergulir. Dana bergulir yang diharapkan diberikan kepada mereka yang layak justru diselewengkan dan diberikan kepada mereka yang dekat dengan orang pemerintahan. Berikut penjelasan dari pihak pemerintah mengapa diperlukan pihak ketiga sebagai penyalur dana bergulir:

Lemahnya mekanisme penyaluran dana bergulir yang ditunjukkan oleh banyaknya tingkat KKN yang terjadi adalah salah satu kegagalan pemahaman mengenai dana bergulir. Dana bergulir sebenarnya adalah sebuah konsep keuangan mikro yang diterapkan oleh satuan kerja pemerintahan. Yang terjadi adalah ketidakmampuan satuan kerja pemerintahan untuk meniru bagaimana lembaga keuangan mikro bekerja. Adanya kegagalan kebijakan dana bergulir tersebut membenarkan argumen-argumen Mader tentang bagaimana keuangan mikro bekerja. Konsep keuangan mikro telah merubah kebijakan pemerintah terhadap usaha mikro. Bukan lagi pemerintah yang memberi pinjaman langsung kepada masyarakat. Tetapi lembaga keuangan mikro yang memberi pinjaman kepada usaha mikro yang akhirnya di dukung pemerintah.

Seiring waktu yang ditemui di lapangan menyadarkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlunya memberikan bunga yang lebih rendah dan pinjaman lunak tanpa agunan. Oleh karena itu sejak tahun 2010 juga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghilangkan agunan dan menurunkan bunga yang sesuai bagi masyarakat menengah kebawah yang masih lemah secara ekonomi. Hal tersebut diperlukan karena ada beberapa peminjam yang sebenarnya sedang berada dalam kesulitan ekonomi dan kemiskinan. Tujuan awal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memaksimalkan potensi keuangan mikro tampaknya mulai berubah sesuai fakta dilapangan bahwa kebanyakan pemilik usaha justru kelas menengah kebawah.

Perkembangan terakhir kredit macet yang terjadi dalam penyaluran dana bergulir mulai meningkat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berperan sebagai investor tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atas apa yang mereka investasikan namun hanya dengan tujuan mensejahterakan orang miskin. Hal tersebut terbukti dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang masih memegang peran dalam menentukan besaran bunga dan agunan yang rendah. Perbedaan tujuan antara mencari keuntungan dan mensejahterakan ini rupanya memiliki dampak yang berbeda juga. Kebijakan dana bergulir yang disalurkan tanpa agunan justru mengakibatkan munculnya kredit macet yang tinggi. Pemerintah yang tidak terlalu menekan untuk mengembalikan pinjaman mengakibatkan banyak orang yang tidak disiplin mengembalikan pinjaman. Kebanyakan dari mereka yang meminjam masih merasa uang tersebut uang yang tidak perlu dikembalikan karena uang bantuan dari pemerintah. Dalam pandangan ekonomi justru kebijakan pemerintah ini dapat juga memunculkan ketidakefektifan atau moral hazard. Bukan tidak mungkin bahwa solusi yang nantinya diberikan ekonom adalah memberikan wewenang bagi bank untuk menentukan bunga dan agunan. Hal tersebut membuktikan bahwa keuangan mikro adalah bentuk baru neoliberalisme atau upaya peminggiran peran negara dalam mengatasi kemiskinan.

Munculnya tingkat kredit macet yang tinggi ini mengakibatkan pengurangan jatah besaran kredit maksimal untuk kredit tanpa agunan. DPRD Sidoarjo meminta dinas Koperindag untuk menurunkan jumlah besaran pinjaman bagi pinjaman tanpa agunan menjadi lima juta rupiah. Dengan adanya pengurangan besaran dana yang dapat dipinjam tanpa agunan diharapkan masalah kredit macet dapat diatasi.

Relasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Bank Jatim

Adanya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal pembuat kebijakan dana bergulir menjadikan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi politik. Oleh karena itu akan menarik untuk menjelaskan fenomena kebijakan dana bergulir dari prespektif ekonomi politik. Penjelasan kebijakan dana bergulir dari prespektif ekonomi politik akan

memberikan gambaran lain mengenai dinamika yang terjadi selama perumusan dan implementasi kebijakan dana bergulir.

Terdapat dua argumen yang menjadikan kebijakan dana bergulir bersifat politik dan memiliki konsekuensi politis. Pertama, kebijakan dana bergulir merupakan upaya Petahana dalam menyenangkan konstituennya, yaitu masyarakat Sidoarjo yang memiliki jumlah UMKM yang besar. Besaran bunga dan agunan bank pada umumnya mengikuti hukum ekonomi dan sewajarnya besaran bunga kredit mengikuti BI Rate. Tetapi dalam kebijakan dana bergulir pemberian bunga terlampaui rendah, yaitu 6%. Dalam hal ini kebijakan dana bergulir merupakan salah satu upaya petahana dalam membantu konstituennya yaitu masyarakat Sidoarjo yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak. Namun dalam hal ini bantuan berupa pinjaman dimana para pengusaha UMKM harus mengembalikan kembali dana tersebut. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memanfaatkan Bank milik pemerintah yaitu bank Jatim agar bantuan tersebut dapat disalurkan melalui mekanisme pinjaman yang baik.

Kedua, besaran jumlah dana yang disalurkan dan besaran pinjaman tanpa agunan bergantung pada dinamika politik. Apabila melihat data perkembangan dana bergulir, penyaluran dana bergulir mengalami peningkatan tiap tahun walaupun jumlah tunggakan juga meningkat secara terus menerus. Hal tersebut menunjukkan pemerintah Sidoarjo masih menaruh perhatian terhadap peningkatan dana bergulir. Apabila melihat kekuatan politik petahana ketika itu, petahana masih cukup kuat karena pengusung petahana mendominasi legislatif. Namun hal tersebut berbeda di tahun 2016 ketika konstelasi politik berubah, legislatif mulai mengkritik kebijakan dana bergulir dan meminta besaran dana tanpa tunggakan diturunkan. Selain itu apabila dilihat dari besaran jumlah dana bergulir yang disalurkan, besaran dana bergulir meningkat ketika tahun pemilu.

Finansialisasi Bantuan Usaha

Kebijakan dana bergulir merupakan sebuah bantuan usaha untuk mendukung UMKM yang difinansialisasikan. Argumen peneliti mengapa menjelaskan dana bergulir sebagai bantuan usaha yang difinansialisasikan sebab dana bergulir yang berasal APBD tersebut disalurkan melalui lembaga finansial dan berdasarkan sistem finansial. Hal tersebut merubah hubungan antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan masyarakat. Dari hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat, menjadi hubungan kredit tidak langsung antara masyarakat dan pemerintah melalui lembaga finansial.

Sebagai lembaga finansial yang menyalurkan kredit mikro, Bank Jatim memiliki peran penting dalam penyaluran dana bergulir. Dalam kebijakan dana bergulir bank Jatim berperan menyeleksi mana kredit yang dapat disetujui dan tidak disetujui. Adanya penyeleksian tersebut untuk melihat kemampuan kreditor dalam mengembalikan kredit yang dipinjam dan memastikan kreditor tidak memiliki kredit macet di bank lainnya.

Walaupun beberapa implementasi kebijakan dana bergulir diserahkan pada sistem finansial namun masih ada beberapa peran yang masih dipegang pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyaluran dana bergulir. Peran tersebut diantaranya adalah penentuan besaran bunga, agunan dan penagihan pembayaran kredit. Hal tersebut bertujuan agar implementasi kebijakan dana bergulir tetap sejalan dengan tujuan awal kebijakan dana bergulir yaitu untuk mendukung UMKM namun tetap menguntungkan bagi PAD. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berperan menentukan besaran bunga yang harus dibayarkan. Bunga yang diberikan pemerintah Sidoarjo dapat terbilang terlampaui rendah, yaitu 6%. Dengan adanya bunga yang rendah dan kredit tanpa agunan diharapkan kebijakan dana bergulir dapat meningkatkan dukungan finansial UMKM. Selain itu peran

penagihan masih dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar pengusaha yang gagal dalam menjalankan usahanya dan masih terjebak kesulitan ekonomi tidak terbebani untuk melunasi dana bergulir.

Namun dari sisi lain adanya peran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal tersebut secara efisiensi, justru menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan dana bergulir. Pemberian kredit tanpa agunan dan palfon kredit yang rendah menyebabkan banyak kredit yang disalurkan menghasilkan kredit macet yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena peminjam tanpa agunan akan cenderung tidak mau melunasi hutangnya sebab kebanyakan dari mereka merasa tidak akan kehilangan apapun apabila mereka tidak melakukan pembayaran. Selain itu pemerintah Sidaorjo yang mengambil peran penagihan menjadikan penagihan yang dilakukan kurang disiplin dan selektif. Justru lemahnya penagihan dan lemahnya sanksi yang diterima akan menyebabkan munculnya moral hazard pada penerima pinjaman sehingga kredit macet akan terus bertambah. Perkembangan terakhir, Pemerintah Sidoarjo memberikan perubahan dalam besaran kredit tanpa agunan agar besaran kredit macet tidak terus bertambah.

Dalam dunia usaha yang tidak pasti pemanfaatan dana begulir tergantung kemampuan pengusaha dalam mengelola usahanya. Bagi pengusaha UMKM yang mampu memanfaatkan kebijakan kredit dengan baik, usahanya mampu berkembang dan menambah penghasilan mereka. Dengan adanya kredit dengan bunga dan agunan yang ringan tersebut menjadikan aliran modal UMKM menjadi lebih lancar. Selain itu dengan adanya modal yang lebih, beberapa pengusaha juga mampu menambah alat produksinya dan menambah karyawan.

Namun seperti produk kredit lainnya yang ditawarkan bank, beberapa kredit yang disalurkan ada juga yang gagal dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha. Penyebab kegagalan bermacam-macam, diantaranya karena sepi pembeli atau kalah bersaing dengan usaha lainnya. Walaupun memberikan kemudahan bagi pengusaha UMKM dalam usahanya tapi sistem pasar mengharuskan mereka bersaing satu sama lain juga. Adanya persaingan menyebabkan diantara mereka ada yang harus kalah. Salah satu contohnya seperti Ibu Ende. Dagangan Bu Ende sepi karena tetangga-tetangga sebelahnya juga berjualan dagangan yang sama dengan beliau. Hal tersebut yang membuat usahanya gagal dan beliau tidak mampu membayar tagihan kepada Bank Jatim.

Finansialisasi Kemiskinan

Selain memfinansialisasi bantuan usaha, kebijakan dana bergulir oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memfinansialisasi orang miskin. Penentuan bunga yang relatif rendah dan pinjaman tanpa agunan menjadikan pinjaman ini sangat mudah di akses bagi masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah. Kebanyakan dari mereka adalah pengusaha mikro yang tidak membutuhkan pegawai dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo memfinansialisasikan kelas ekonomi yang sebelumnya tidak tersentuh sektor finansial sama sekali, yaitu orang miskin.

Ditengah sulitnya ekonomi dimana tingkat persaingan sangat tinggi, sulit bagi mereka untuk memperbaiki kesejahteraan hanya dengan mengandalkan pekerjaan yang tersedia. Dana bergulir dengan tawaran bunga rendah tanpa agunan merupakan peluang emas untuk memperbaiki kesejahteraan mereka secara mandiri. Hal tersebut yang menjadikan dana bergulir senjata baru untk mengatasi masalah kemiskinan yang masih banyak terjadi di negara berkembang. Dalam kasus ini pemerintah kabupaten Sidoarjo menggunakan lembaga finansial sebagai alat dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Kemiskinan telah menjadi target ekstraksi surplus bagi lembaga finansial. Adanya kebijakan dana bergulir ini memang membantu orang miskin agar mampu menambah penghasilannya dengan modal yang dipinjam. Namun disisi lain secara tidak langsung orang miskin dalam hal ini menjadi objek finansial oleh bank Jatim demi akumulasi kapitalnya. Orang miskin diberi pinjaman dan juga diberikan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman beserta membayar bunga dari pinjaman tersebut.

Selain itu peran pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai penagih tunggakan menjadikan sistem finansial ini berjalan lebih manusiawi. Beberapa pengusaha UMKM yang gagal dalam menjalankan bisnisnya dan masih terjebak dalam kesulitan ekonomi diberikan kelonggaran dalam membayar tunggaknya. Bahkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih memberikan pelatihan dan diberikan tempat dalam pameran. Hal tersebut yang membedakan penjelasan mader dengan yang ada dalam kebijakan dana bergulir. Adanya peran pemerintah sebagai penagih tunggakan menjadikan sistem finansial yang eksploitatif ini lebih manusiawi.

Kebijakan dana bergulir mempercepat inklusi finansial di dalam masyarakat dalam semua golongan. Dalam wawancara terhadap salah satu penerima kucuran dana bergulir, beliau mengakui bahwa dana bergulir ini merupakan satu-satunya akses keuangan yang pernah dia ambil. Sebelumnya, menurutnya institusi bank adalah sebuah institusi yang menakutkan tapi dengan tawaran bunga yang rendah dan apalagi dikelola dengan pemerintah membuat beliau yakin bahwa dana bergulir ini merupakan peluang untuk memperbaiki hidupnya. Sebelumnya beliau hanya meminjam dana dari lembaga-lembaga informal dan tradisional seperti PKK dan Koperasi.

Secara tidak langsung adanya kebijakan dana bergulir ini juga merubah kebiasaan lama atau tradisional masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan modal. Konsep lembaga keuangan sebenarnya sudah ada dalam masyarakat Indonesia walaupun masih sangat tradisional. Lembaga-lembaga seperti PKK dan Koperasi sebenarnya adalah wadah bagi masyarakat ekonomi lemah untuk dapat meminjam modal. Adanya keuangan mikro akan mengubah dan menarik masyarakat miskin dari akar kebiasaan tradisionalnya. Mereka yang tadinya selalu meminjam ke PKK atau Koperasi sekarang beralih ke lembaga keuangan mikro.

Bantuan bagi orang miskin yang hanya dipinjamkan tersebut mendisiplinkan mereka untuk bekerja agar dapat mengembalikan pinjamannya. Orang-orang miskin yang meminjam biasanya takut untuk berurusan dengan bank. Mereka yang berurusan dengan bank biasanya juga di ingatkan untuk berhati-hati. Dengan begitu masyarakat kelas menengah kebawah ini memiliki tanggung jawab untuk melunasi apa yang mereka pinjam melalui usaha. Tapi di sisi lain usaha bukanlah sesuatu yang pasti dimana semua orang pasti untung. Hal tersebut yang menjadikan beberapa orang miskin gagal dalam melunasi pinjaman. Bantuan yang harusnya mempermudah kehidupan mereka justru berbalik menjadi beban bagi pikiran mereka.

Walaupun begitu adanya kebijakan dana bergulir ini juga menjauhkan masyarakat miskin dari eksploitasi finansial informal yang lebih berbahaya. Salah satunya mereka terhindar dari rentenir dan lintah darat atau yang biasa disebut bank titil. Kurangnya modal masyarakat miskin ini sering dimanfaatkan oleh rentenir untuk melakukan pemerasan. Rentenir biasanya meminjamkan modal dengan cicilan yang sangat rendah dan jangka waktu yang sangat lama. Namun bunga yang diberikan sebenarnya sangat tinggi dan merugikan bagi peminjam. Hal tersebut berbeda dengan bagaimana lembaga keuangan mikro bekerja yang lebih modern. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Kusminarsih mengenai orang-orang yang meminjam dari rentenir.

Yang diuntungkan dan dirugikan dalam kebijakan dana bergulir

Secara Politik keberhasilan Kebijakan dana bergulir akan menguntungkan kepemimpinan petahana. Dana bergulir yang di implementasikan kabupaten Sidoarjo telah berhasil menjalankan targetnya dan bahkan menjadi sumber penadapatan baru bagi PAD Kabupaten Sidoarjo. Pemasukan yang berasal dari pajak juga meningkat sebab pinjaman yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan yang tinggi akan mengakibatkan lebih banyak masyarakat yang membelanjakan uangnya. Uang yang dibelanjakan beberapa di antaranya adalah produk yang diberi pajak oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo diantaranya restoran.

Sebagai lembaga finansial penyalur dana bergulir Bank Jatim dalam hal ini mendapatkan keuntungan atas kerjasamanya dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Keuntungan yang didapatkan berasal dari biaya administrasi yang harus dibayarkan beserta pembagian keuntungan bunga kredit 2% dari tiap kredit yang dilayani. Kebijakan pemerintah ini menjadi sumber akumulasi kapital alternatif bagi bank Jatim. Hal tersebut berbeda dengan mereka yang mendapatkan dana bergulir.

Dalam sistem pasar, dunia usaha adalah dunia yang kompetitif dan penuh persaingan. Oleh karena itu bantuan dana bergulir ini tidak bisa semata-mata langsung membantu mensejahterakan penerima bantuan. Mereka yang gagal dalam mengelola pinjaman dana bergulir justru akan lebih merugi karena mereka harus mengembalikan pinjaman beserta membayar bunganya. Tapi banyak dari pengusaha UMKM yang juga dapat diuntungkan dengan adanya kebijakan tersebut karena dengan adanya kebijakan tersebut. Diuntungkan atau tidaknya pengusaha UMKM dengan adanya kebijakan ini tergantung individu masing-masing dalam pengelolaan usahanya.

Dalam kebijakan dana bergulir, bank umum lainnya adalah pihak yang dirugikan. Sebagai lembaga finansial antara satu bank dengan bank lainnya harus berkompetisi untuk menawarkan produk layanan finansial mereka. Kredit mikro merupakan salah satu produk yang dimiliki semua lembaga perbankan lokal. Namun kebijakan dana bergulir yang di rumuskan pemerintah kabupaten Sidoarjo ini memberikan bunga dan agunan cicilan yang terlampau murah daripada tawaran kredit dari bank-bank lainnya. Hal tersebut menjadikan bank lainnya kesulitan dalam menawarkan produk kredit mikro mereka

Kesimpulan

Dari temuan peneliti di lapangan terjadi pergeseran peran pemerintah dalam mengintervensi pasar. Pemerintah yang secara konvensional hanya melakukan penerimaan dan pengeluaran dari pajak dan penganggaran. Dalam kebijakan ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai investor. Pemerintah memanfaatkan masalah mengenai kurangnya akses finansial terhadap UMKM menjadi sumber ekstraksi bagi PAD selain itu alat politik bagi petahana. Selain itu lemahnya pemerintah dalam menyalurkan pinjaman menyebabkan perlunya lembaga finansial sebagai pihak ketiga dalam penyaluran dana bergulir. Disini peningkatan signifikansi lembaga finansial muncul. Dari kebijakan pemerintah lembaga finansial sebagai pihak ketiga menerima keuntungan dari kebijakan yang dirumuskan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Mader, Philip. *The Political Economy of Microfinance: Financialising Poverty*. (London:Palgrave Macmilan, 2015)

Marieska Virdani, Sindonews.com, Usaha mikro mampu tanggulasi kemiskinan. (<http://ekbis.sindonews.com/read/800341/34/usaha-mikro-mampu-tanggulasi-kemiskinan-1383186634>, diakses 22 April 2016)

¹Berita Jatim, *Keberhasilan 4 Tahun Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.Hum dan Wabup H. MG. Hadi Sutjipto, SH*. (http://m.beritajatim.com/advetorial/222653/keberhasilan_4_tahun_bupati_sidoarjo_h.saiful_ilah_sh_m.hum_dan_wabup_h.mg.hadi_sutjipto_sh.#.VvoDN9Mh_fI, diakses 22 Maret 2016)

¹ Op. Cit., Prilla Prastiany, hal. 6

¹ Humas Protokol Pemkab Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo Gulirkan Dana Bergulir Kepada UMKM dan Koperasi (<http://www.humas-protokol.sidoarjokab.go.id/berita-507-pemkab-sidoarjo-gulirkan-dana-bergulir-kepada-umkm-dan-koperasi.html>, diakses tanggal 22 April 2016)